

ANALISIS SISTIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN

Fifi Hasmawati

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

fifihasmawati@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Ilustrasi dari pedesaan menggambarkan dimensi-dimensi yang berhubungan dengan kemiskinan, keterbelakangan, kurangnya pendidikan dan lemahnya administrasi yang baik. Berbicara mengenai pembangunan daerah maka relevansinya dengan pembangunan pedesaanlah yang mempunyai peranan yang penting. Karena pembangunan ditujukan pada lingkungan dan sumber daya alam dan manusianya, setiap individu di pedesaan memiliki kesempatan menjadi manusia yang produktif dan menciptakan perkembangan untuk diri dan lingkungannya dengan berkesinambungan. Pembangunan pedesaan menempatkan dirinya dalam tiga sifat yaitu, sebagai strategi, program, dan gerakan, guna membangun kesadaran dan dirinya dalam keadaan yang lebih baik¹. Pembangunan pedesaan (rural development) merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu. Pembangunan pedesaan juga ditujukan untuk peningkatan taraf hidup dengan meningkatkan kualitas pendidikan, produksi, perumahan dan pendapat. Untuk itu pembangunan yang pedesaan ini merupakan pembangunan daerah yang bagian dari pertumbuhan pembangunan nasional suatu negara, terutama pada negara dunia ketiga dan berkembang.

Kata Kunci: Sistematika Pembangunan Daerah, Pembangunan Pedesaan

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakatnya. Pembangunan sebuah konsep normatif dan merupakan eufemisme untuk perubahan, modernisasi dan pertumbuhan (Bryan & White, 1987). Pembangunan yang berhasil, kadang-kadang selalu diidentikkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang rendah, karena pada kondisi ini suatu negara dapat dikatakan makmur. Sekarang dapat kita lihat pembangunan ekonomi dunia ditandai dengan kemajuan sains, teknologi dan bisnis yang penuh dengan kompetisi (Hasan, 2011). Pada dasarnya pembangunan dibanyak negara berkembang dipusatkan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi yang sehat, tapi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi ternyata tidak sertamerta menghasilkan sebuah tetesan ke bawah (*trickle down effect*), sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik yang semakin melebar. Pemikiran strukturalis klasik menghendaki intervensi pemerintah dalam melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar dan melakukan perbaikan struktur ekonomi secara inkremental. Dalam pendekatan ini struktur kekuasaan dan struktur sosial tidak dilakukan secara radikal (Rakhmat, 2013).

Suatu pemikiran pembangunan yang baru yang disebut pendekatan neostrukturalis (*neostructuralism*) (Sach, 1995) yang merupakan perbaikan terhadap pemikiran strukturalis klasik (*classical structuralism*). Aspek utama yang sangat penting dalam pendekatan neostrukturalis adalah aspek yang berkaitan dengan peranan pemerintah dalam proses pembangunan. Selanjutnya ada tiga upaya pokok yang perlu dilakukan yaitu, 1) *an effective development state*, 2) *social policy* dan 3) *autonomous industrialization*. Upaya yang pertama

melakukan suatu proses rekonstruksi kekuasaan untuk kepentingan rakyat banyak atau rekonstruksi politi, yang kedua pelaksanaan reformasi agraria dan rekonstruksi sosial untuk tujuan pembangunan prakondis sosial untuk memerangi kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan, sedangkan upaya yang ketika merancang program industrilisasi yang otonom. Program idustrilisasi yang dimaksud adalah yang didukung oleh kekuatan basis teknologi produksi didalam negeri yang diadaptasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan faktor endoment didalam negeri.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan sebuah situasi sosial tertentu, menggambarannya dengan benar, menggunakan kata-kata dan metode yang tepat untuk mengumpulkan data analisis yang diperoleh dari situasi yang alami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistematika Pembangunan Daerah

Max Weber (1947) memberikan gagasan birokrasi bersifat modern, menurutnya cara ini dapat lebih efisien dan efekti dalam meningkatkan tujuan dari pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintahan. Birokrasi menurut Weber dipandang sebai alat diatngan pihak penguasa untuk melaksanakan keputusan-keputusan politik, yang semua tercermin dari konsep kebijakkan (*policy*) yang berbeda dengan politik (*politic*). Birokrasi menjabarkan semua kebijakan, proyek, program dan keputusan dalam pengambilan kebijakan, maka disinilah timbul nantinya persoalan yang akhirnya akan memntukan kualitas dari kebijakan yang diambil. Selanjutnya Weber juga memandang birokrasi yang modern merupakan tujuan formal sebagai penggerak yang mengarahkan pembuatan kebijakan administratif, dimana tujuan formal ini ada pada tingkat top menejer atau menejer puncak dari suatu organisasi, yang merupakan penentu dalam pengambilan keputusan dalam birokrasi-birokrasi pembangunan. Ketrkaitan antara organisasi dan birokrasi ini dalam keefektifannya untuk kerangka kebijakan pembangunan dengan meihat dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan yang pertama ini melihat bagaimana efek dari kebijakan pembangunan. Perhatiannya terutama ditujukan pada konteks perkembangan pembuatan kebijakan. Tentunya terdapat banyak cara untuk menilai efek kebijakan yang ditimbulkan dalam pembangunan, karena peranan negara atau departemen-departemen pemerintah sebagai agen modernisasi.
2. Pada pendekatan kedua kontek pembangunan yang lebih luas, dimana dalam pendekatan ini proses pembuatan kebijakan dilihat dan ditentukan oleh faktor ekonomi, politik dan sosial budaya.

Ufford (1988) membedakan pembangunan yang berorientasi pada masukan (*input oriented*) dan pembangunan yang berorientasi pada keluaran (*output oriented*), hal ini bertujuan untuk menentukan sifat dari birokrasi pembangunan itu sendiri. Karena untuk

setiap orientasi pembangunan ini birokrasi yang terjadi memerlukan penanganan yang berbeda-beda, tetapi terlepas dari semua itu, pentingnya birokrasi pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya hubungan yang sangat penting dalam kesinambungan pembiayaan pembangunan. Dalam model birokrasi Weber (1947) mengenai birokrasi modern memandang tujuan formal sebagai penggerak yang mengarahkan pembuat kebijakan administratif, dimana tujuan-tujuan formalnya ditingkat manajemen puncak dipandang sebagai sifat penentu dalam pengambilan keputusan dalam birokrasi pembangunan itu sendiri.

Birokrasi dalam pembangunan ini membuat peranan pemerintah sangat kuat dalam pembangunan hal ini senada dengan pendapat para ahli dan pemikir ekonomi dunia yang menitik beratkan suatu pemikiran pembangunan yang baru dengan pendekatan neostrukturalis (neostucturalism) yang merupakan pembaharuan dari pemikiran strukturalis klasik (classical structuralism). Aspek yang ditekankan pada neostrukturalis ini yang berkaitan dengan peranan pemerintah dalam proses pembangunan. Dimana dalam proses pembangunan pemerintah melakukan peran sebagai (Sach, 1995):

1. *An Effective Development State*. Struktur kekuasaan untuk kepentingan rakyat, pada bagian ini proses rekonstruksi kekuasaan untuk kepentingan rakyat dengan melakukan rekonstruksi politik
2. *Social Policy*. Rekonstruksi sosial ini merupakan pelaksanaan reformasi sosial dan reformasi agraria dengan tujuan pembentukan prakondisi sosial yang diperlukan dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan
3. *Autonomous Industrialization*. Otonom industrialisasi yang diprogramkan dengan tujuan agar program industrialisasi ini berbasis pada dukungan teknologi produksi didalam negeri yang diadaptasi sehingga sesuai dengan faktor endowment didalam negeri

Pembangunan merupakan suatu proses untuk menciptakan kesejahteraan sebagai suatu refleksi dan koreksi atas kekurangan yang telah dilakukan yang berorientasi pada pertumbuhan. Model pembangunan seperti ini bahwa kesejahteraan selalu terkait dengan kemiskinan, terutama pada negara berkembang. Karenanya Sach mengatakan bahwa didalam masyarakat akan terjadi suatu proses yang harmonis yang akan menyebarkan manfaat pertumbuhan ekonomi keseluruhan strata masyarakat melalui apa yang disebut mekanisme tetesan ke bawah (Trickle Down Mechanism), model ini mengasumsikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi suatu negara terutama tergantung pada tingkat investasi tertentu. Namun menurut Sach (1995) untuk itu tolak ukur dari perkembangan ekonomi didasari atas tiga kriteria yaitu 1) Berkurangnya tingkat kemiskinan yang absolut, 2) Menurunnya ketimpangan atau distribusi pendapatan yang merata, 3) Mengcilnya atau berkurangnya tingkat pengangguran.

Terkait dengan birokrasi pembangunan yang sudah dibahas diatas, maka birokrasi pembangunan itu sendiri dipengaruhi secara langsung oleh kontrakdiksi mendasar dari tujuan-tujuan pembangunan. Dalam pembangunan, para pimpinan atau menejer pembangunan mampu melaksanakan peranan barunya yaitu kewirausahaan yang artinya mampu memprakarsai dan memfasilitasi tindakan yang akan terjadi terkait dengan

kepentingan publik, karena struktur birokrasi dalam suatu pemerintahan negara merupakan lingkungan institusional yang terdapat memfungsikan para menejer-menejer pembangunan (Esman, 1986).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari proses pembangunan nasional. Dalam prosesnya diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal seluruh potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas dan kemampuan individu dan masyarakat. Pembangunan daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat daerah secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah dan kemampuan nasional dengan upaya memperhatikan perkembangan keadaan daerah. Sebagai konsep pembangunan adalah sesuatu yang tak terelakkan secara normatif, berorientasi terhadap tujuan, mendorong nilai-nilai dasar, dan menyerap norma-norma budaya (Rakhman, 2013). Ada berapa sasaran dan tujuan dari pembanguana daerah diantaranya:

1. Meningkatkan keadaan ekonomi daerah sehingga mampu mandiri dan mampu menyelenggarakan pembangunan daerah
2. Meningkatkan keadaan sosial daerah untuk mencapai kesejahteraan sosial secara adil dan merata
3. Mengembangkan setiap ragam budaya daerah sehingga menjadi kelestarin budaya daerah
4. Meningkatkan dan memelihara keamanan masyarakat untuk mendukung pembangunan sosial.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah tersebut, ada berapa masalah yang dihadapi, dan ini merupakan tantangan untuk terus peningkatan pencapaian tujuan pembangunan daerah, diantara masalah tersebut adalah

1. Masih terlihat rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah yang mengakibatkan rendahnya dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, dan
2. Munculnya berbagai masalah sosial, kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, kesenjangan pembangunan antar daerah, antar kota dan desa masih lebar, infrastruktrual ekonomi dalam pembangunan masih terbatas, dan masih rendahnya kualitas pelayanan publik

Sejalan dengan permasalahan itu sendiri, ada beberapa isu-isu kontemporer yang ada dalam pembangunan daerah, yaitu

1. Pembangunan wilayah yang mencakup peningkatan ekonomi wilayah, pembangunan perkotaan, pembangunan pedesaan, penataan ruang, dan pengembangan wilayah tertinggal.
2. Pemberdayaan masyrakat, yang meliputi penguatan lembaga lokal, pemberdayaan masyarakat miskin, dan peningkatan partisipasi publik

Untuk mampu mengatasi dan memperbaiki strategi pembangunan didaerah itu sangat terkait dengan dukungan partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, seperti yang dikutip pada pandangan Padilla (1992) yang menjelaskan bahwa “*A local development strategy must see to it that citizen participation become a hallmark of*

development planning and implementation and that the fruit of development programs, local government are enjoined to apply social- awareness – stimulating strategies, involve the active participation of the local folk in decition making process”. Selanjutnya seperti yang telah diuraikan diatas bahwa sebagai sebuah konsep, pembangunan adalah suatu yang tak terelakkan secara normatif, berorientasi pada tujuan, dan mendorong nilai-nilai dasar dan norma budaya, Padilla (1992) mentakan “*Development is process and phenomenon that everyone wishes to take place. Desirable as it is, there have been difrrent perceptions of the form of development to pursue, the methods or approaches to be used in pursuing it, and the role the central and local government, agencies and institutions have to play in its realization.*” Sedangkan untuk pembangunan daerah dikatakan bahwa “*Local development is essentially peocess by which local goverment, community organization and local institutions manage their existing resources and collaborate with one another in pursuing development goals. The development goal to be pursue and the strategies applied to attain these goals may vary from one locality to another in term of emphasis, but revolve around these key aims: meeting the basic needs of the local population, generation of employmen and ultimaty, alleviation of poverty. Local development is process oriented, and is distinguished by the use of avaible and potential resources human, institutional and physical. It emphasizes local initiatives, community participation and involvement of existing community base institutions.*”

Pembangunan daerah selalu tidak terlepas dari kebijakan, baik itu datangnya dari pusat atau daerah itu sendiri. Karena ketika ada kebijakan untuk menempatkan pembangunan setiap daerah secara otonom atau desentralisasi akan sangat mempengaruhi pertumbuhan pembangunan didaerah-daerah. Pada kondisi kebijakan yang desentralisasi dan otonom daerah membantu keterkaitan pembangunan itu sendiri terhadap kesesuaian aspek-aspek yang melekat pada daerah masing-masing. Seperti kondisi politik atau pengambil kebijakan di daerah, yaitu pemerintahnya sendiri dan kondisi daerah untuk pembangunan itu sendiri. Tujuan yang sangat di harapan dari kebijakan desentarsisasi dan otonom ini adalah mampu menciptakan good goverment yang secara efektif tentu akan meningkatkan pembangunan daerah

2. Pembangunan Pedesaan

Kata pedesaan sering kali membuat kita membayangkan konseptual yang bergambarkan pada keterbelakangan, kemiskinan, kurangnya pendidikan dan tingkat pekerja formal sedikit, bahkan kapasitas untuk proses administratif yang kurang baik. Sebetulnya kapasitas pembangunan pedesaan ini luas bidangnya, mencangkup aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan. Semua aspek ini terkait dengan kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya baik alam dan manusianya. Pengelolaan sumberdaya yang ada dilakukan secara efektif, dengan tujuan apa bila pengelolaan ini bermanfaat dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya, artinya keefektifan dalam pengelolaan sumberdaya akan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara kesinambungan.

Pembangunan pedesaan (Rural Development) menurut Tjokrowinoto (1987) bahwa pembangunan pedesaan menempatkan dirinya dalam tiga sifat yaitu, sebagai strategi,

program dan gerakan, guna membangun kesadaran dan dirinya dalam keadaan yang lebih baik. Pembangunan pedesaan merupakan strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu (Chambers,1983), Pembangunan pedesaan dapat juga dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan (Hilhorst, 1990).

Konsep pembangunan pedesaan ini yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Konsep ini sering disebut dengan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai usaha untuk lebih mengedepankan masyarakat untuk membangun kesejahteraan dengan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam kerangka pembangunan daerah. Dalam prosesnya diarahkan untuk memanfaatkan produksi sumberdaya pembangunan secara tepat, dan untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berjuang guna menciptakan suatu lingkungan yang menjadikan setiap individu masyarakat memiliki kesempatan menjadi masyarakat yang produktif serta menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi perkembangan diri manusia secara terus menerus. Pendapat Long (1987) yang dikutip oleh Rahmat (2013), bahwa tiga pendekatan pembangunan pedesaan di negara-negara berkembang, yaitu :

1. Pembangunan desa terpadu, yakni menekankan usaha menaikkan daya produksi petani, menciptakan kemudahan untuk memperoleh kesempatan, ekonomi bagi golongan penduduk pedesaan yang miskin, dan secara umum menekankan pada pengembangan sumberdaya manusia dan menaikkan pendapatan petani dan permintaan akan barang-barang konsumen.
2. Pengembangan agropolitan, agar penduduk memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup dan otonom untuk merancang serta mengendalikan sendiri langkah proses pembangunannya dan,
3. Desa membangun diri dengan kekuatan sendiri, terutama otonom yang luas dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana pembangunan.

Sedangkan untuk melihat perspektif dalam pendekatan pembangunan menurut Bryant dan White (1987)¹¹ ada tiga perspektif yaitu :

1. Bahwa pembangunan pedesaan dapat didekati sebaik-baiknya sebagai masalah teknologi, yang kemudian diidentifikasi dengan green revolution.
2. Anggapan keliru bahwa keuntungan skala besar dan pemilikan usaha besar adalah lebih efisien,
3. Petani pedesaan yang miskin menjadi miskin karena tidak memiliki kekuasaan.

Dari ketiga perspektif diatas menekankan bahwa pembangunan pedesaan menuntut pemusatan perhatian yang lebih luas mengenai pendapatan pedesaan dan kebutuhan pedesaan. Dengan demikian maka pembangunan pedesaan bersifat multisektor yang menyangkut semua segi kehidupan masyarakat, sehingga bukanlah pembangunan yang berjalan sendiri melainkan merupakan bagian dari pembangunan daerah dan nasional suatu negara.

Dalam pembangunan masyarakat dan pemerintah merupakan unsur utama atau fasilitator dalam proses pembangunan. Pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan pedesaan harus cermat dalam menghadapi berbagai pilihan dan prioritas mengenai apa yang seharusnya didahulukan dari begitu banyak kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan. Pemerintah harus memiliki strategi yang baik dalam menentukan pilihan atas alternatif dari pembangunan yang akan dilakukan. Sebagai fasilitator pemerintah daerah harus mampu membuat manajemen pembangunan untuk menentukan strategi apa yang akan dilakukan setelah pilihan atas alternatif di tentukan, sehingga peranan dari proses manajemen pembangunan dimulai dari perencanaan yang merupakan suatu perumusan rencana pembangunan, yang terfokus pada pembangunan “desa”. Pendekatan partisipatif merupakan suatu metode yang berkenan dengan pengelolaan pembangunan pedesaan, terbagi dari beberapa metode (Bahua, 2007) seperti,

1. *Participatory Rural Appraisal*, Metode perencanaan ini menekankan pada pemahaman lokasi dengan cara belajar dari dan untuk bersama masyarakat, agar mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui pendekatan multidisiplin dan keahlian dalam pengambilan informasi dan pembuat keputusan. Alat yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis informasi, melalui review data skunder, observasi lapangan, wawancara semi terstruktur, diskusi kelompok yang terfokus, serta analisis kecenderungan dan perubahan.
2. *Participatory Research and Development*, Metode ini melakukan kegiatan penelitian tentang partisipasi dan pembangunan komunitas yang berupaya untuk membantu masyarakat yang memiliki kebersamaan, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka.
3. *Rapid Rural Appraisal*, merupakan metode pengumpulan informasi dari luar, kemudian dianalisis dan diteliti yang hasilnya digunakan sebagai informasi untuk membuat perencanaan tanpa melibatkan masyarakat.
4. *Participatory Action Research*, Metode ini menganalisis kritis terhadap situasi yang secara kelembagaan diciptakan. Prinsip dasarnya dari metode ini menjadi pengalaman masyarakat sebagai sasaran pengkajian.
5. *Participatory Learning Methods*. Metode ini lebih menekankan pada kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang dibentuk atas dasar partisipatif peserta dalam semua kegiatan, mulai merencanakan, melaksanakan sampai pada tahap menilai pembelajaran dalam pelatihan
6. *Methodology for Participatory Assessment*, Metode ini dikembangkan untuk menilai suatu proyek pembangunan komunitas (community development). Metode ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan, manajer program dan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa memantau kesinambungan pembangunan dan mengambil tindakan yang diperlukan agar menjadi lebih baik.
7. *Participatory Learning and Action*, metode ini menekankan pada program kegiatan belajar dan bertindak secara partisipatif. Dimana dalam penerapannya mencerminkan dialektika yang dinamis antara kajian dan tindakan secara tidak terpisah

KESIMPULAN

Terselenggaranya pembangunan pedesaan yang berhasil tidak terlepas dari sistim atau metode yang tepat dalam pengelolaan. Pemahaman partisipatif yang bertujuan untuk menggali permasalahan yang ada dalam masyarakat, penyebab terjadinya masalah, dan cara mengatasinya dengan menggunakan sumberdaya lokal dengan mengacu pada prinsip pemberdayaan masyarakat (empowerment).

Keberhasilan reformasi agraria (land reform) dengan menciptakan lembaga pelaksanaanya dalam membuat kebijakan reformasi itu sendiri. Lembaga ini sebagai administrasi yang menyeleksi proses dari organisasi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Pemecahan masalah pembangunan pedesaan diarahkan pada pengembangan kapasitas, keadilan dan pemberdayaan kehidupan masyarakat yang lestari, sejahtera dan saling menyayangi. Pembangunan pedesaan di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah dan nasional. Sangat diperlukan usaha transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Dengan ketersediaan infrastruktur di pedesaan diharapkan dapat berfungsi dan mendorong aktivitas ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Tjokrowinoto, M, 1987, Politik Pembangunan, Yogyakarta, Tiara Waca
Bryan and White, 1987, Manajemen Pembangunan Negara Berkembang, Jakarta, LP3ES
Hasan Aedy, 2011, Teori dan Aplikasi ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Yogyakarta, Graha Ilmu
Rakhmat, 2013, Dimensi Strategi Manajemen Pembangunan, Yogyakarta, Graha Ilmu
Sach, 1995, dalam Rakhmad, Dimensi Strategi Manajemen Pembangunan
Eaton, Joseph, W. 1986, Pembangunan kelembagaan dan Pembangunan Nasional, Jakarta, Universitas Indonesia Press
Esman, Milton, 1991. Management dimensions of Development, USA. Kumarin Press
Budiman, Arif, 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, Gramedia
Conyers, Diana, 1991, Perencanaan Sosial Dunia Ketiga, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
Weber, M. 1947, The Theory of Social and Economic Organization, USA. The Free Press.